

## Hubungan Indonesia – Uni Eropa: Kemitraan Komprehensif

YULI MUMPUNI

Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika-Eropa,  
Ditjen Amerika-Eropa Departemen Luar Negeri RI

---

### Abstract

Relations between the EU and Indonesia are now three decades old. Indonesia – European Union (EU) bilateral relations nowadays have been progressively growing importance and leading towards a positive direction. The growth of Indonesia – EU relations have achieved notable gains and this progress has been made possible among others by the vibrant dynamics and momentous events that occurred in Indonesia as well as in the EU. Indonesia and EU are now moving steadily towards another landmark that is the establishment of a bilateral comprehensive partnership and cooperation agreement. This partnership agreement will surely serve as a basis for mutual future efforts to tap the vast potential of Indonesia – EU bilateral relations.

---

*Keywords:* bilateral, international cooperation, diplomacy, foreign policy

Perkembangan hubungan bilateral Republik Indonesia - Uni Eropa tidak dapat dilepaskan dari dinamika berkembang yang terjadi di Uni Eropa (UE) dan Indonesia. UE yang telah berhasil sebagai *a solid regional grouping*, terus melaksanakan konsolidasi melalui proses integrasi dalam bidang politik dan ekonomi untuk mencapai ambisinya dalam menyatu-

kan seluruh negara di Eropa di bawah payung UE. Demikian pula Indonesia yang demokratis, stabil, dan diakui oleh masyarakat internasional sebagai mitra penting di kawasan. Keduanya merupakan aktor penting yang terus saling mendekat untuk memperkuat kemitraan agar dapat lebih mampu menanggapi tantangan-tantangan global.

Keterkaitan masalah dan kepentingan antara Indonesia dan UE telah menciptakan suatu *common agenda* yang memperkuat hubungan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan. UE menilai Indonesia sebagai negara demokratis dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan berpotensi sebagai katalisator stabilitas keamanan kawasan. UE menilai Indonesia memiliki peranan strategis bagi upaya pemeliharaan stabilitas dan keamanan di kawasan. Perhatian UE terhadap perkembangan politik di Indonesia pada umumnya menyangkut masalah demokrasi, pengelolaan pemerintahan yang baik, dan penegakan HAM. UE juga menaruh perhatian dan dukungan terhadap upaya Indonesia dalam memerangi terorisme dan memberikan dukungan terhadap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Di lain pihak Indonesia melihat UE sebagai suatu kekuatan ekonomi dan politik global yang dapat menjadi mitra untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional.

Peningkatan peran UE baik dalam konteks global maupun regional merupakan perwujudan dari salah satu tujuan pembentukannya, yaitu untuk menegaskan peranan Eropa di dunia. UE yang tetap mempertahankan pendekatan multilateralisme merupakan mitra penting Indonesia dalam menanggapi isu-isu global.

### Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama UE

Negara-negara Eropa terus melakukan pengembangan kebijakan pertahanan dan keamanan yang beridentitas UE seperti tercermin dalam *European Security and Defense Policy (ESDP)*. Selain itu, *Treaty on the European Union* yang ditandatangani di Maastricht, Belanda pada tanggal 7 Februari 1992 (sehingga lebih dikenal dengan nama *Maastricht Treaty*), juga menyepakati kebijakan bersama *Common Foreign and Security Policy (CFSP)*.

Kebijakan umum UE di bidang hubungan luar negeri difokuskan pada isu-isu non-proliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal (WMD), stabilitas kawasan, HAM, dan memperkuat sistem multilateral yang efektif (*effective multilateralism*). Selain itu, sesuai dengan *EU Plan of Action to Combat Terrorism* yang dikeluarkan tidak lama setelah peristiwa 11 September di AS, terorisme telah menjadi isu utama dalam hubungan eksternal UE.

Di bidang hubungan luar negeri ini, UE tampak semakin memperlihatkan ambisinya untuk menjadi aktor global. Langkah untuk memenuhi ambisinya tersebut sempat menghadapi tantangan berat ketika menghadapi aksi militer AS ke Irak bulan Maret 2003, ketika UE sempat terpecah menjadi dua kutub; yaitu para pendukung AS versus penentang

AS. Situasi tersebut diperbaiki melalui kesepakatan tentang strategi keamanan bersama UE yang dituangkan dalam dokumen Dr. Javier Solana berjudul "A Secure Europe in a Better World". Dokumen tersebut diadopsi oleh KTT UE di Brussels bulan Desember 2003 sebagai pedoman kebijakan luar negeri dan pertahanan bersama UE dengan menggunakan mekanisme yang telah dimiliki UE, antara lain ESDP dan CFSP. Dokumen tersebut juga mengakui perlunya kemitraan UE-ASEAN dalam upaya pemeliharaan keamanan regional di Asia Tenggara.

Hubungan eksternal UE pada dasarnya ditujukan untuk memperluas pengaruh dan perannya secara global maupun bilateral. UE juga menegaskan pentingnya memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga UE berdasarkan kemitraan, nilai-nilai demokrasi dan penghormatan HAM dalam rangka menciptakan kawasan terdekat yang aman dan sejahtera (*EU Neighborhood Policy: rings of friends*). Termasuk dalam kerangka kebijakan ini adalah pengembangan kemitraan strategis UE-Rusia.

Hubungan UE dengan negara-negara berkembang di kawasan lain seperti Amerika Latin dan Asia pada umumnya merupakan kerjasama pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Dengan negara-negara berkembang tersebut, perhatian UE

masih dipengaruhi oleh masalah demokrasi dan HAM serta liberalisasi pasar. Hal tersebut sering dijadikan kondisionalitas dalam hubungan UE dengan negara-negara berkembang.

#### Kebijakan Luar Negeri RI terhadap Uni Eropa

Secara umum, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap UE merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan mitra potensial, baik dalam konteks global maupun regional dan bilateral. Arah kebijakan difokuskan pada pemerkuatan struktur hubungan tradisional Indonesia dengan negara-negara di Eropa guna mendukung kepentingan nasional Indonesia.

Upaya pemerkuatan hubungan dengan berbagai mitra di Eropa tersebut dilakukan dalam kegiatan diplomasi yang pada tahun 2006 mencapai perkembangan penting. Terdapat keperluan di pihak Indonesia dan mitra Eropa untuk membangun institusionalisasi hubungan *strategic partnership* dan *comprehensive partnership*. Hal ini dilatarbelakangi oleh landasan politik luar negeri RI yang bebas aktif sehingga Indonesia senantiasa siap bermitra dengan pemain-pemain utama dunia, yang juga menilai Indonesia sebagai mitra penting mereka. Berbagai kemitraan strategis dan komprehensif tersebut dilakukan atas pertimbangan kepen-

tingan politis, yang pada gilirannya perlu diterjemahkan menjadi peningkatan interaksi ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Indonesia memandang UE sebagai mitra penting di berbagai bidang. Peningkatan hubungan RI – UE antara lain ditandai oleh meluasnya agenda pembicaraan dalam forum dialog RI – UE. Indonesia juga mengembangkan hubungannya dengan UE “*through all avenues*”, termasuk dalam kerangka ASEAN (PMC, ARF) dan ASEM karena keduanya merupakan modalitas potensial yang bertujuan meningkatkan dialog, saling pengertian dan kerjasama antara negara-negara di Asia dan Eropa dalam kemitraan yang sejajar.

Dalam hal kerjasama pembangunan, Indonesia menekankan semangat kemitraan yang saling menghormati dan menguntungkan serta non-kondisionalitas. Bagi Indonesia, UE yang mempunyai lebih dari 450 juta penduduk dan rata-rata GDP perkapita mencapai US\$ 28.100 (2006), merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk-produk Indonesia, selain merupakan sumber investasi utama Indonesia. Kemampuan teknologi dan kemajuan pendidikan di negara-negara anggota UE juga merupakan nilai tambah strategis UE, yang mendorong Indonesia untuk terus memelihara hubungan dengan UE.

### Hubungan Indonesia – Uni Eropa

Hubungan bilateral RI - UE dirintis sejak tahun 1967 di bawah kerangka ASEAN ketika UE masih berbentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community*). Perkembangan hubungan RI – UE tidak terlepas dari dinamika yang berkembang di UE dan di Indonesia. Di sisi UE, perkembangan UE yang selalu disibukkan oleh kegiatan-kegiatan perluasan UE sejak 1957 hingga tercapainya ambisi UE dalam menyatukan seluruh negara di Eropa di bawah payung UE (UE-29)<sup>1</sup> dan perkembangan situasi keamanan global menjadikan UE lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kepentingan bersama Eropa. Di sisi Indonesia, situasi dalam negeri yang diwarnai oleh kegiatan pemulihan ekonomi, perkembangan proses demokrasi dan munculnya gangguan keamanan separatisme serta ancaman terorisme, telah berdampak terhadap kebijakan politik luar negeri masing-masing. Dalam hal hubungan eksternal dengan Asia, pada beberapa tahun terakhir UE menunjukkan ambisinya untuk meningkatkan peran politisnya di kawasan Asia Tenggara melalui upaya peningkatan kerjasama

<sup>1</sup> 1992 Treaty of Maastricht and 1997 Treaty of Amsterdam: “Any European state which respects the principles set out in article 6(1) [i.e. “liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule of law”] may apply to become a Member of the Union.”

dengan ASEAN guna menciptakan “an international order based on effective multilateralism”.<sup>2</sup>

Indonesia dipandang sebagai negara yang mempunyai peranan strategis bagi upaya memelihara stabilitas dan keamanan di kawasan. Hubungan UE dengan Indonesia selama ini terjalin dalam kerangka kerjasama EU-ASEAN, ARF, dan ASEM. Pergantian kepemimpinan yang reformis dan lebih demokratis di Indonesia disambut baik oleh UE karena lebih membuka kesempatan bagi UE untuk mengadakan dialog politik dengan Indonesia. Perhatian UE terhadap perkembangan politik di Indonesia pada umumnya menyangkut masalah demokrasi dan HAM. Selain itu, berkenaan dengan munculnya isu terorisme, pihak UE juga menaruh perhatian dan dukungan terhadap upaya Indonesia dalam memerangi terorisme. Khusus mengenai masalah keamanan dan separatisme di Aceh, Maluku dan Papua, UE dan negara-negara anggotanya telah menyatakan

dukungan mereka terhadap NKRI dan mendukung upaya damai melalui dialog.

Proses demokrasi di Indonesia disambut dengan baik oleh UE yang memandang Indonesia sebagai “a voice of democracy”. Pandangan UE tersebut menunjukkan apresiasi UE terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Melihat perkembangan pandangan UE terhadap Indonesia ini, kekuatan hubungan bilateral RI - UE adalah terletak pada beberapa kesamaan yang memberikan sumbangan bagi upaya memperkuat hubungan bilateral, di antaranya adalah:

- Keduanya mempunyai motto “unity in diversity” yang menjunjung tinggi keanekaragaman penduduk, baik budaya, bahasa, nilai-nilai, tradisi, dan ideologi;
- Perkembangan proses demokratisasi di Indonesia yang ditandai oleh keberhasilan Pemilu 2004 menempatkan keduanya sebagai kekuatan demokrasi di dunia;
- Keduanya mempunyai komitmen terhadap penghormatan HAM, penegakan hukum, *good governance*, pembangunan sosial-ekonomi, dan anti-terorisme;
- Keduanya mempunyai komitmen terhadap sistem multilateral yang kuat dan efektif;
- Keduanya saling menganggap

<sup>2</sup> Dokumen “A Secure Europe in A Better World”: “Regional organisations also strengthen global governance. For the European Union, the strength and effectiveness of the OSCE and the Council of Europe has a particular significance. Other regional organisations such as ASEAN, MERCOSUR and the African Union make an important contribution in a more orderly world”.

penting, sebagai bagian dari kekuatan regional yang bertanggung jawab terhadap upaya pemeliharaan keamanan dan kestabilan di kawasan masing-masing dan dalam memberikan kontribusi terhadap upaya pemeliharaan keamanan internasional.

Dikaitkan dengan CFSP, beberapa kesamaan seperti diuraikan di atas merupakan "*starting positive points*" yang dapat mendukung upaya memperkuat hubungan RI - UE.

Peningkatan hubungan RI - UE secara substansi juga terlihat dalam pernyataan yang disampaikan oleh Menlu RI dan Menlu Belanda/Presidensi dalam pertemuan di Jakarta, Agustus 2004. Kedua Menlu tersebut menyatakan bahwa kedua pihak mempunyai "*common agenda*" yaitu demokrasi, HAM, lingkungan hidup, *good governance*, dan anti-terorisme.

Hubungan RI - UE menunjukkan perkembangan penting pada tahun 2005, yang ditandai oleh tanggapan UE yang sangat cepat dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Nias. UE juga mendukung proses perdamaian di Aceh yang menghasilkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh wakil dari Pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia, tanggal 15 Agustus 2005. Dukungan

UE terhadap implementasi Nota Kesepahaman juga ditunjukkan dengan partisipasi UE dalam *Aceh Monitoring Mission* (AMM) bersama dengan beberapa negara anggota ASEAN (Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam) dan terhadap program reintegrasi mantan anggota GAM. UE juga berpartisipasi dalam pemantauan Pilkada Aceh tanggal 11 Desember 2005 dengan mengirimkan *EU-Election Observation Mission* (EOM).

Sekjen Dewan Uni Eropa menyatakan bahwa "*The AMM is a new departure for the EU in more ways than one. Not only is it the first time that the European Union has deployed a mission in Asia, it is also the first time that we have worked in partnership with countries from the Association of South East Asian Nations (ASEAN). Five ASEAN countries: Brunei, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, provided monitors alongside the participating European Countries.*"<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Article by Dr. Javier Solana, "Consolidating the Peace Process in Aceh", issued in *New Strait Times*, Singapore, dated 13 December 2006.

### Kemitraan Komprehensif RI – UE

Sejak tahun 2000 UE telah menunjukkan keinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Hal tersebut dinyatakan dalam Komunikasi EC tahun 2000 berjudul *"Developing Closer Relations between Indonesia and the European Union"* yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari strateginya di Asia, yang dituangkan dalam Komunikasi EC berjudul *"Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced Partnership"*. Indonesia menyambut baik keinginan UE tersebut sebagai pengakuan terhadap perkembangan di Indonesia. Kesepakatan kedua pihak untuk meningkatkan hubungan tercermin dalam *"RI-EU Joint Declaration"* pertemuan Menlu RI – Komisioner Hubungan Eksternal (EC) di Luxembourg, 14 Juni 2000, yang menyepakati peningkatan dialog RI-UE melalui *Bilateral Consultative Forum* (Forum Konsultasi Bilateral/FKB).

Forum tersebut memprioritaskan pembahasan pada masalah-masalah bilateral, utamanya upaya bersama untuk meningkatkan perdagangan, investasi dan kerjasama pembangunan serta dialog politik. Masuknya mata acara dialog politik tersebut yang memberikan "warna" baru dalam hubungan RI – UE. Sejak dibentuk pada tahun 2000, forum tersebut telah mengadakan lima kali pertemuan yang berlangsung secara bergantian di

Indonesia dan di Markas Besar EC di Brussels.<sup>4</sup>

Rencana FKB ke-6 di Surabaya September 2006 ditunda sampai Maret 2007 berkenaan dengan dirampungkannya *"RI-EU Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation"*.

UE menilai hubungannya dengan ASEAN dan Indonesia masih dapat ditingkatkan. Dalam kerangka ini, EC membuat suatu pendekatan baru yang komprehensif untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan aspek kebudayaan.

Pada 9 Juli 2003, EC kembali mengeluarkan Komunikasi berjudul *"A New Partnership with South East Asia"* yang merupakan kerangka strategi baru UE untuk menjalin hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan memperkuat kehadiran UE di kawasan Asia Tenggara. Strategi tersebut menawarkan kemungkinan pembentukan perjanjian bilateral antara UE dengan negara-negara di Asia Tenggara. Secara garis besar, strategi tersebut berisikan enam (6) prioritas UE di Asia Tenggara, yaitu:

<sup>4</sup> FKB ke-1 di Brussels, Maret 2000, ke-2 di Jakarta, Juni 2001, ke-3 di Brussels, Desember 2002, ke-4 di Jogja Mei 2004, dan ke-5 di Brussels Juni 2005

- 1) Mendukung stabilitas regional dan perang melawan terorisme (*supporting regional stability and the fight against terrorism*). UE akan menggunakan ASEAN dan ASEM sebagai sarana bagi dialog kebijakan dan jika diminta UE bersedia membantu negara-negara Asia Tenggara dalam memerangi terorisme.
- 2) Menjadikan HAM, prinsip demokrasi, dan *good governance* sebagai pertimbangan utama dalam seluruh dialog dan kerjasama dan setiap kesepakatan bilateral baru harus berisi elemen utama penghormatan terhadap HAM (*Promoting human rights, democratic principles and good governance*).
- 3) Mengedepankan isu-isu hukum dan dalam negeri (*mainstreaming justice and home affairs issues*) karena UE menganggap kedua hal itu penting bagi hubungan eksternalnya. Isu-isu *justice and home affairs* yang menjadi perhatian UE utamanya adalah masalah imigrasi, penyelundupan manusia, pencucian uang dan kejahatan terorganisir.
- 4) Memasukkan dinamika baru dalam hubungan perdagangan dan investasi ASEAN-EU (*injecting a new dynamism into regional trade and investment relations*) melalui *Trans-regional EU-ASEAN Trade Initiative* (TREATI) yang diharapkan dapat memperbesar arus perdagangan dan investasi antara kedua kawasan.
- 5) Meneruskan dukungan pembangunan di negara-negara yang tertinggal tingkat pembangunannya (*continuing to support the development of less prosperous countries*).
- 6) Mengintensifkan dialog dan kerjasama sektoral (*intensifying dialogue and cooperation in specific sectors*) termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan tinggi dan budaya, transportasi, energi, dan lingkungan.

Keinginan UE untuk membentuk perjanjian bilateral tersebut dapat dipahami mengingat selama ini kerjasama bilateral UE dengan negara-negara di kawasan masih berdasarkan perjanjian kerjasama dalam kerangka ASEAN, yaitu "EU – Indonesia, Malaysia, the Philipinnes, Singapore, and Thailand Cooperation Agreement (ASEAN member countries) yang ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 7 Maret 1980.

Dewan UE di bawah Presidensi Belanda dalam "menyambut" perkembangan di Indonesia pasca Pemilu 2004 telah mengeluarkan resolusi yang mengusulkan peningkatan kualitas dan frekuensi dialog menyangkut berbagai isu yang menjadi perhatian kedua pihak. Dewan UE lebih jauh mengusulkan

dialog tersebut dapat dilakukan pada tingkat Menteri Luar Negeri dan dilembagakan. Resolusi tersebut antara lain menyatakan *"The Council reaffirmed the EU's wish to build a closer partnership with Indonesia. It recalled the EU's commitment to further strengthening the political dialogue. The Council proposed that the political dialogue be institutionalized on a regular basis through ministerial EU Troika meetings. The Council reiterated the EU's respect for the territorial integrity of the Republic of Indonesia and recognition of its importance as a major partner."*<sup>5</sup>

Indonesia memandang resolusi tersebut sebagai pernyataan apresiasi UE terhadap Indonesia sebagai mitra penting di kawasan karena Indonesia dinilai telah berhasil melaksanakan pemilu secara demokratis dan aman.

Indonesia menanggapi usulan dialog pada tingkat luar negeri dengan positif dan memandangnya sebagai wujud dari pengakuan UE terhadap perkembangan di Indonesia yang demokratis, sejalan dengan kebijakan Indonesia yang mengharuskan hubungan RI - UE di masa mendatang dapat diarahkan ke *"comprehensive partnership"* dengan memanfaatkan semua potensi yang menguntungkan kedua pihak.

<sup>5</sup> Resolution of the EU Council, issued on 11 October 2004.

Penguatan kemitraan komprehensif tersebut kemudian dibahas oleh kedua pihak dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri Troika UE di Jakarta bulan Maret 2005 yang merupakan perwujudan dari Resolusi Dewan UE tersebut di atas. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk membentuk suatu *framework agreement on comprehensive partnership and cooperation* akan menjadi dasar hukum yang kokoh bagi pengembangan dan peningkatan kerjasama RI - UE masa mendatang. Sejalan dengan perkembangan kerjasama RI - UE yang telah meluas ke dialog politik, maka tepatlah jika dikatakan bahwa kemitraan diantara kedua pihak bersifat komprehensif di berbagai sektor. Oleh karena itu, substansi perjanjian dimaksud tidak hanya mengenai bidang-bidang kerjasama di sektor teknis dan kerjasama pembangunan, tetapi juga di sektor politik seperti promosi HAM, *legal cooperation*, non-proliferasi senjata pemusnah massal dan keamanan khususnya penanggulangan terorisme.

Berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Jakarta tersebut, maka mulai bulan Maret 2006 kedua pihak telah merundingkan substansi perjanjian yang berlangsung secara bergantian di Brussels dan Jakarta. Dalam perundingan terakhir di

Jakarta bulan Desember 2006, kedua pihak sepakat bahwa penandatangananannya akan dilakukan pada awal tahun 2007 agar kedua pihak dapat segera mengimplementasikannya. Indonesia tidak melihat adanya kesulitan bagi kedua delegasi perunding untuk merampungkan dokumen perjanjian tersebut karena diantara kedua pihak telah terdapat kesamaan pandangan mengenai berbagai hal sebagai mitra komprehensif di kawasan.

Perjanjian ini kelak berfungsi sebagai sebuah *comprehensive agreement* yang dapat menjadi fondasi permanen bagi pengembangan kerjasama bilateral RI - UE yang lebih luas dan juga mampu menampung potensi-potensi kerjasama baru di masa mendatang.

Menlu Hassan Wirajuda dalam pertemuan dengan para Duta Besar UE di Jakarta tanggal 20 November 2006 antara lain menyatakan bahwa *"During the visit of Mr. Javier Solana to Indonesia last April, we have discussed various efforts in strengthening relation led to a common conclusion that in concrete terms, our partnership and solidarity has been strongly demonstrated in sensitive political undertakings. At the same time, we are also moving steadily towards another landmark that is the establishment of a*

*bilateral comprehensive partnership and cooperation agreement"*. Lebih lanjut dinyatakan bahwa *"Acknowledging the development of Indonesia - EU relationship, and as we share common agenda, namely democracy, good governance, environment, counter-terrorism and security, I believe the ongoing negotiations on the Comprehensive Agreement on Partnership and Cooperation will be conducted smoothly. The projected Agreement will serve as basis for future efforts to tap the fast potential of our bilateral relations"*.

Dalam semangat yang sama, Komisioner Hubungan Luar (*External Relation Commissioner*) Benita Ferrero-Waldner juga mengharapkan perjanjian dimaksud akan semakin memperkuat hubungan RI - UE. Hal tersebut dinyatakan dalam sambutan pembukaan Seminar *"EU - Indonesia Day"* di Brussels, 7 Desember 2006 yang ditutup dengan pernyataan sebagai berikut: *"The European Union is committed to foster its dialogue with Indonesia and to maintain its support for the Indonesian government's reform efforts. The new Partnership and Cooperation Agreement between us, which should be finalized soon, should help cement our ties; as will the increase in our development cooperation for 2007-2013"*. □